

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

1. Profil

Daerah Istimewa Yogyakarta (bahasa Jawa: Dhaérah Istiméwa Ngayogyakarta) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman, Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia, Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185.80 km². Ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan, Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km²

2. Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada 8⁰ 30' – 7⁰ 20' Lintang Selatan, dan 109⁰ 40' – 111⁰ 0' Bujur Timur, Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunungapi Merapi, satuan fisiografi Pegunungan Sewu atau Pegunungan Seribu, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan fisiografi Dataran Rendah. Dua daerah aliran sungai (DAS) yang cukup besar di

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah DAS Progo di barat, dan DAS Opak-Oya di timur, Sungai-sungai yang cukup terkenal di DIY antara lain adalah Sungai Serang, Sungai Progo, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Boyong-Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak, dan Sungai Oya.

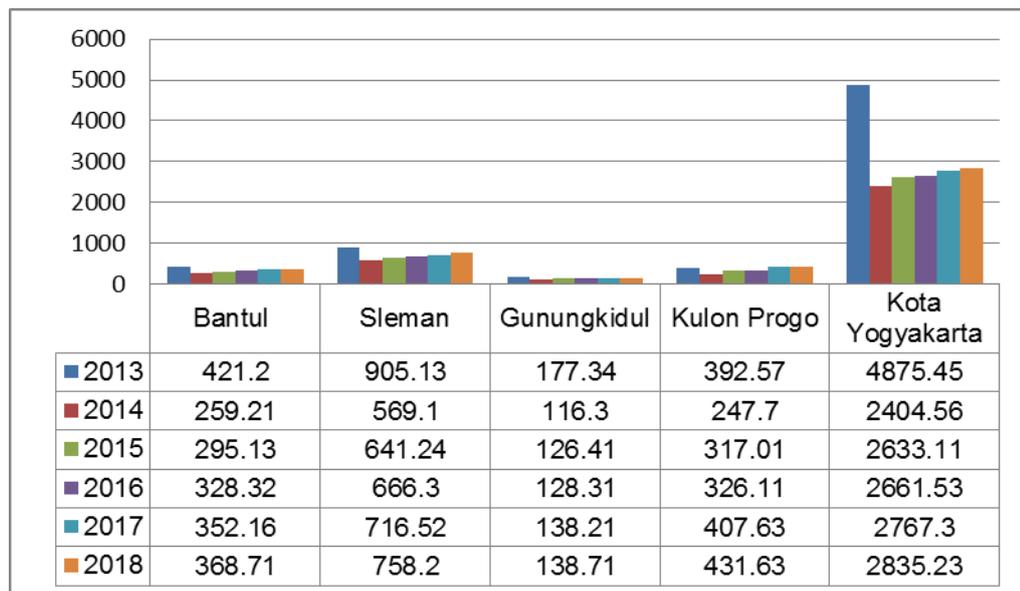
Secara administratif Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi dalam 5 wilayah daerah tingkat II, yaitu :

1. Kotamadya Yogyakarta dengan luas 32,5 km²
2. Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km²
3. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km²
4. Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km²
5. Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km²

B. Gambaran Umum Variabel

1. Indeks Keuangan Inklusif.

Indeks keuangan inklusif diperoleh berdasarkan hasil perhitungan dari dimensi penetrasi, ketersediaan dan penggunaan jasa perbankan. Untuk mengukur dimensi penetrasi perbankan dilihat dari jumlah rekening deposit terhadap populasi dewasa, dimensi ketersediaan dilihat dari ketersediaan kantor cabang disetiap negara, sedangkan dimensi penggunaan dilihat melalui proporsi kredit dan DPK terhadap GDP.



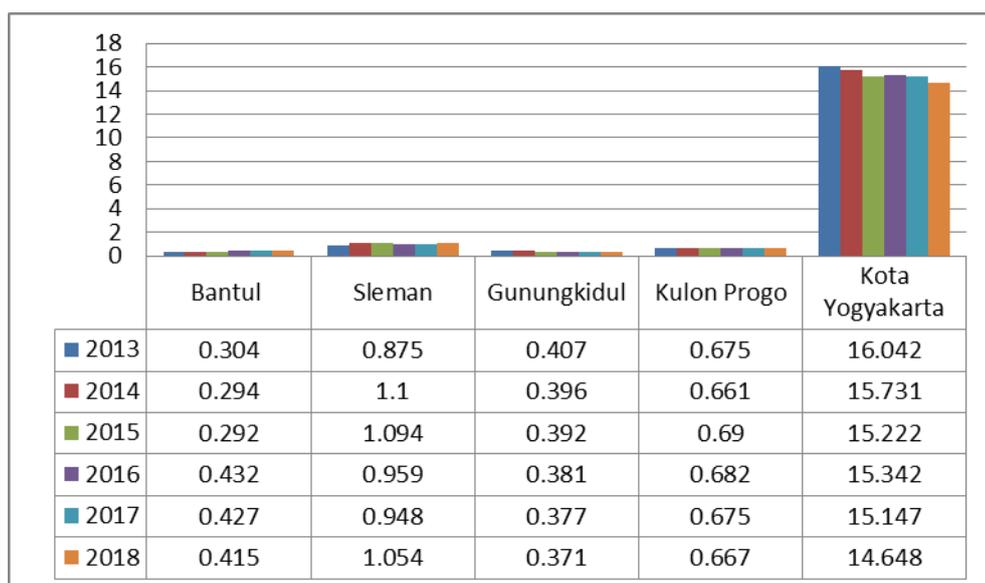
Sumber : Bank Indonesia,2020

GAMBAR 4.1.

Jumlah Rekening Deposit tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018
(Per 1000 orang dewasa)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah rekening deposit tiap Kabupaten dan satu kota madya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai 2014. Namun , dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Kabupaten yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu yaitu Kab Kulon Progo, dengan jumlah 392,57 unit rekening per 1000 orang dewasa pada tahun 2013 dan terus meningkat hingga pada jumlah 431,63 unit rekening per 1000 orang dewasa pada tahun 2018. Posisi tertinggi dalam jumlah rekening deposit per 1000 orang dewasa di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta, dengan jumlah rekening di tahun 2013 sebesar 4875,45 unit rekening

per 1000 orang dewasa menjadi 2835,23 unit rekening per 1000 orang dewasa di tahun 2018. Walaupun mengalami penurunan akan tetapi Kota Yogyakarta memiliki nilai yang paling tinggi diantara kabupaten lainnya. Sementara itu jumlah rekening deposit paling rendah adalah Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 177,34 unit rekening per 1000 orang dewasa pada tahun 2013 kemudian menjadi 138,71 unit rekening per 1000 orang dewasa di tahun 2018. Dari keseluruhan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan rekening deposit paling rendah tercatat di Kabupaten Gunungkidul.



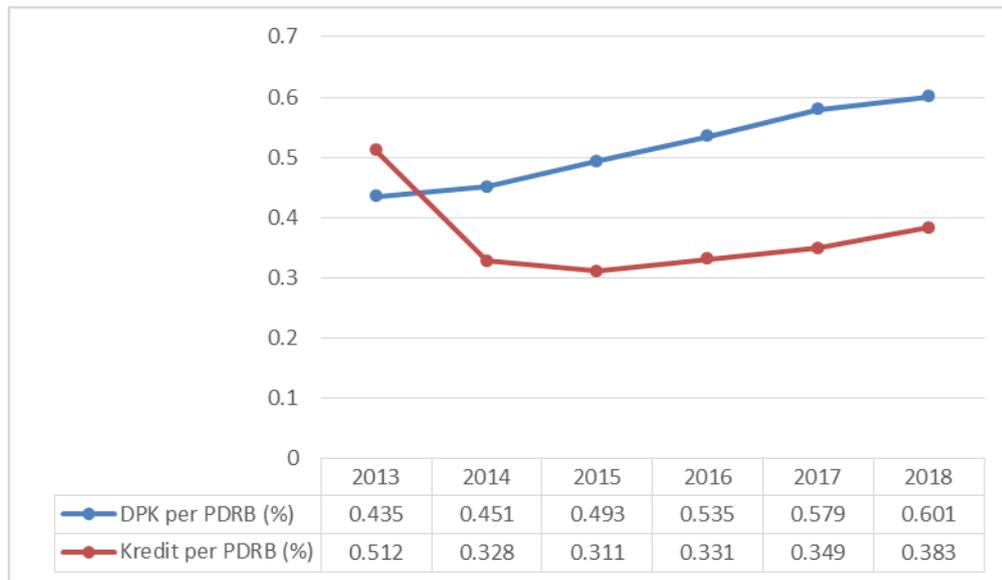
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

GAMBAR 4.2.

Jumlah Kantor Pelayanan Perbankan Tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018
(Per 100.000 orang dewasa)

Untuk menghitung dimensi kedua keuangan inklusif yaitu dimensi ketersediaan, yang dapat dilihat dari jumlah kantor cabang.

Selama enam tahun terakhir perkembangan kantor pelayanan terus meningkat hingga pada tahun 2018 tercatat Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Bantul dan Sleman memiliki tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah kantor pelayanan jasa keuangan yang dimiliki Kabupaten Bantul yakni sebesar 0,304 unit kantor per 100.000 orang dewasa pada tahun 2013 kemudian menjadi 0,415 unit kantor per 100.000 orang dewasa di tahun 2018. Sedangkan kenaikan jumlah kantor pelayanan jasa keuangan di Sleman sebesar 0,875 unit kantor per 100.000 orang dewasa pada tahun 2013 menjadi 1,054 unit kantor per 100.000 orang dewasa pada tahun 2018. Sementara itu, tren yang terjadi Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta, justru berkebalikan. Di tahun 2013 tercatat 0,407 unit kantor per 100.000 orang dewasa yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul dan turun menjadi 0,371 unit kantor per 100.000 orang dewasa pada tahun 2018. Kondisi serupa juga dialami oleh Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Di Kulon Progo pada tahun 2013 memiliki jumlah 0,675 unit kantor per 100.000 orang dewasa namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,667 unit kantor per 100.000 orang dewasa. Sedangkan di Kota Yogyakarta data terakhir tahun 2018 menunjukkan jumlah kantor sebanyak 14,648 unit kantor per 100.000 orang dewasa dari 16,042 unit kantor per 100.000 orang dewasa di tahun 2013.



Sumber : Bank Indonesia, 2020

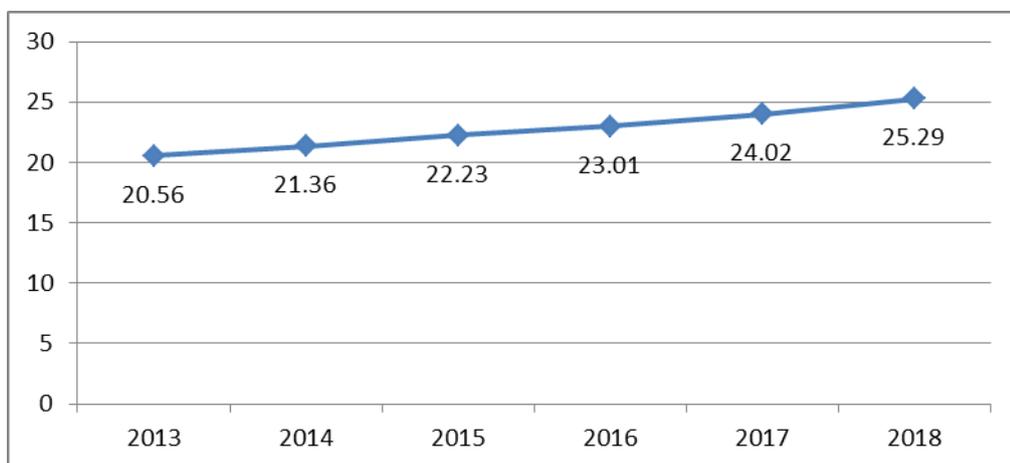
GAMBAR 4.3.

Jumlah DPK per PDRB dan Kredit per PDRB Tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018 (persen)

Pada dimensi ketiga, nilai diperoleh dengan melihat proporsi DPK dan Kredit terhadap PRDB. Perkembangan DPK dan Kredit yang disalurkan bank umum terhadap PRDB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) per PRDB yang dihimpun oleh bank umum serta kredit per PDRB yang disalurkan bank umum dari tahun 2013 hingga 2018 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada perekonomian. Terjadi peningkatan dalam penggunaan jasa perbankan seiring berjalannya waktu akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. PDRB Per Kapita.

Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolok ukur tingkat pembangunan dan kemakmuran sebuah Negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita menjadi gambaran kondisi ekonomi yang baik dari sebuah negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, semakin baik pula perekonomian negara tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020

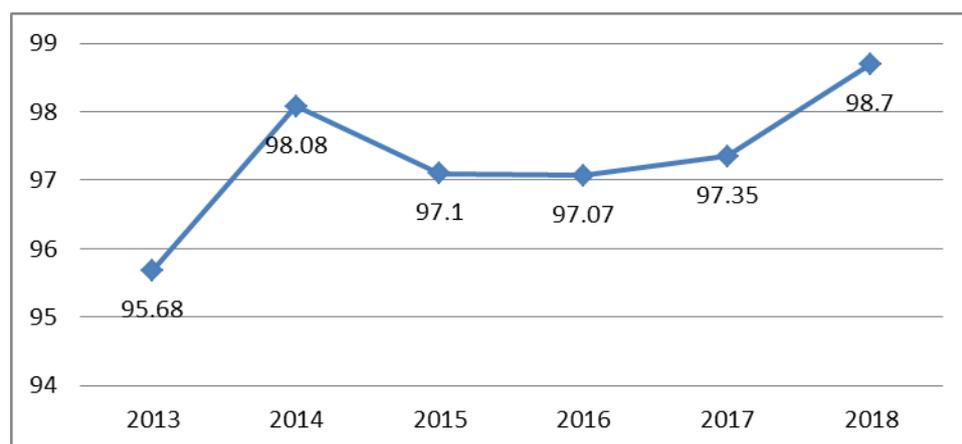
GAMBAR 4.4.

PDRB Per Kapita di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018 (Juta Rupiah)

Pendapatan per kapita pada gambar 4.4 di atas dapat dilihat mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 pendapatan per kapita Tingkat Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 20,56 juta rupiah dan naik menjadi 25,29 juta rupiah pada tahun 2018.

3. Angka Melek Huruf.

Angka melek huruf adalah suatu kondisi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya. Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kawasan yang memiliki nilai angka melek huruf yang cukup tinggi. Berdasarkan gambar 4.5 dibawah pada tahun 2013 angka melek huruf Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 96,5 persen dan cenderung naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 angka melek huruf di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 98,7 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

GAMBAR 4.5.

Angka Melek Huruf di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018 (Persen)

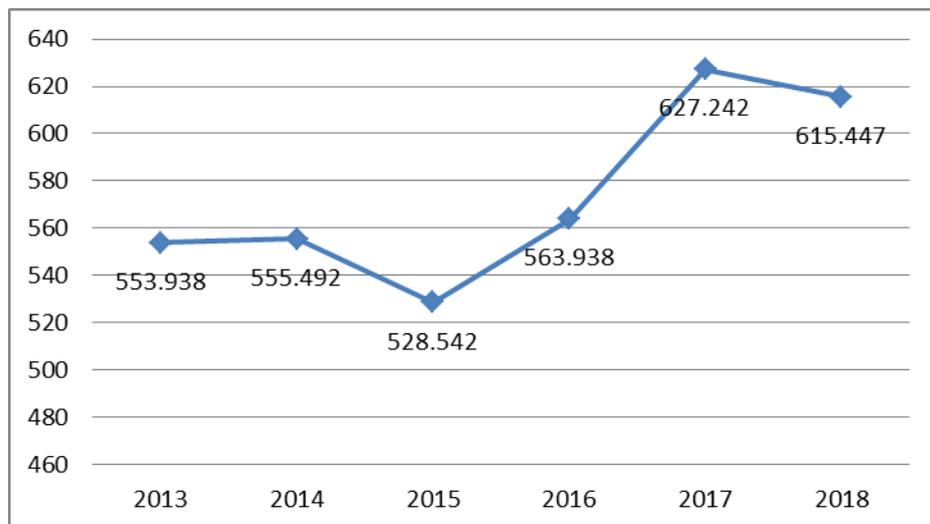
Perkembangan angka melek huruf di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa meningkatnya pendidikan masyarakat yang cenderung lebih tinggi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Kesadaran

masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka melek huruf.

4. Jalan Aspal.

Jalan menurut keadaannya dapat dilihat dari jenis kondisi jalan, kelas jalan, dan permukaan jalan. Pada umumnya kondisi jalan dapat dibagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan tidak terinci. Jalan menurut keadaannya dilihat dari kelas jalan dapat dibagi menjadi kelas I, II, III, dan tidak terinci. Sementara untuk permukaan jalan dapat di bagi menjadi di aspal, kerikil, tanah, dan tidak terinci.

Kondisi jalan yang seringkali menjadi pusat perhatian oleh masyarakat adalah kondisi jalan yang baik dan beraspal. Hal ini karena akan memperlancar lalu lintas, akses, serta distribusi barang dan jasa yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Perkembangan jalan dengan kondisi yang baik dan beraspal di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 4.6 di bawah ini :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

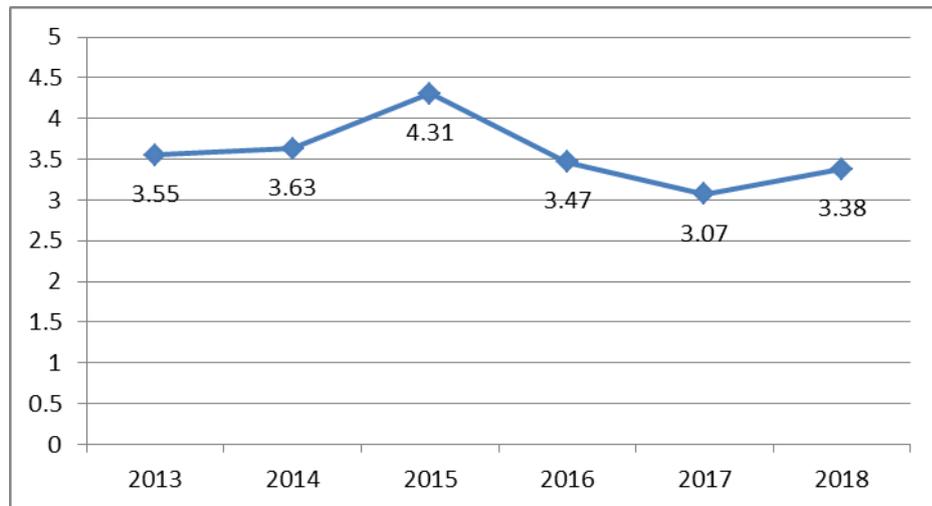
GAMBAR 4.6.

Panjang jalan Aspal kondisi baik dan sedang di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018 (Kilometer)

Berdasarkan gambar 4.6 diatas, perkembangan jalan aspal di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan fluktuasi dengan panjang 553,938 kilometer pada tahun 2013 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 615,447 Kilometer.

5. Pengangguran.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Data pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 4.8 di bawah ini :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

GAMBAR 4.7.

Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018 (persen)

Dari tahun ke tahun pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi. Pada tabel diatas menunjukkan tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta nilai tertinggi ada pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 4,31 persen dan nilai terendah pada tahun 2017 dengan nilai pengangguran sebesar 3,07 persen. Nilai pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 adalah 3,38 persen.